

**Keterlibatan Masyarakat Dalam
Penyusunan Kebijakan Publik Sebagai
Wujud Partisipasi Politik**

Vinni Dini Pratiwi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budidaya, Binjai

Vinnipratiwi29@gmail.com

Article History

Submitted: 12 Maret 2024

Revised: 7 Juli 2024

Accepted: 8 Agustus 2024

Abstrack

The aim of this research is to describe community involvement in formulating public policy as a form of political participation. The research method uses a literature review, or literature study. The results of the research show that policy making is an effort to organize political life which is directed at the growth and development of the political order based on Pancasila and the 1945 Constitution. Policy is aimed at developing ethics and morals of political participation to create a stable political life with an increasing role and functioning of the superstructure. and political infrastructure in an effective, real, dynamic, harmonious, responsible manner, as well as community awareness and political participation that continues to increase.

Keywords: *participation; policey; politic;public*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik sebagai wujud partisipasi politik. Metode penelitian menggunakan menggunakan *literature review*, atau kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuatan kebijakan merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ditujukan kepada pengembangan etika dan moral partisipasi politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, secara nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab, serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus meningkat.)

Kata kunci; Kebijakan, Publik, Partisipasi, Politik

Pendahuluan

Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* (pemecahan masalah) dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), lebih adaptif kebijakan dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik.

Kebijakan diharapkan dapat memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Sedangkan menurut United Nation sebagaimana dikutip oleh Solichin menyatakan bahwa (2014:9) kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kelompok, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas- aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Partisipasi politik yang memiliki intensitas tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat sangat antusias (Tristiani, 2017), Sedangkan partisipasi politik yang rendah maka

Vinni Dini Pratiwi

diindikasikan sebagai masyarakat kurang antusias dalam terlibat pada Pemilu dan menandakan suatu hal yang menjadi alasan untuk tidak berpartisipasi. Partisipasi politik dinilai dapat mempengaruhi sebuah tatanan politik dalam sebuah negara demokratis (Singestecia et al., 2018). Dalam partisipasi politik, kepentingan masyarakat menjadi indikator utama sehingga hal tersebut yang menjadi latar belakang mereka dalam berpartisipasi. Hal tersebut juga mencerminkan adanya keterkaitan dengan proses Pemilu, partisipasi menjadi wadah aspirasi dalam mengambil bagian dari proses pemilihan pemimpin secara langsung (Akhrani et al., 2018).

Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu.

Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Melihat proses pembentukan kebijakan dalam perspektif sistem, merujuk pada sejumlah karakteristik yang sama (*common characteristics*). Merujuk pada teori sistem, karakteristik yang sama yaitu sebagai berikut: 1) Sistem memiliki struktur, 2) Sistem merupakan jeneralisasi dari realitas, 3) Sistem cenderung berfungsi dengan cara yang sama. Sistem bekerja dengan melibatkan masukan dan keluaran dengan mana berlangsung suatu proses aktifitas dari sistem, yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan, 4) Ragam bagian dari suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu, dan demikian pula halnya dengan adanya hubungan-hubungan struktural, yang juga terbentuk dalam hubungan fungsional tertentu, 5) Karena adanya hubungan fungsional antar bagian-bagian dari sistem, maka berlangsunglah aliran atau transfer atas substansi tertentu, 6) Sistem juga mempertukarkan energi atau substansi tertentu dengan sistem yang lebih besar.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan *literature review*, atau kajian literatur, adalah metode penelitian yang mengkaji dan meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam literatur berorientasi akademik. Metode ini menggunakan kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Sumber-sumber rujukan yang diacu hendaknya relevan dan terbaru (*state of art*) serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan dalam tahapan proses perumusan kebijakan, yaitu: Tahap Identifikasi Masalah: Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan atau menyalurkan aspirasi atau kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi kepada pemerintah. Masyarakat juga berhak menyampaikan opininya terkait hal tersebut. Penyampaian Masalah: Penyampaian masalah dan cara pemecahannya bisa disampaikan langsung melalui media massa atau pada saat dengar pendapat yang diselenggarakan pemerintah. Di era digital kemudahan penyampaian aspirasi dapat dicapai melalui sosial media pemerintah dan instansi yang terbuka. Tahap Perumusan atau Formulasi Rancangan Kebijakan: Masyarakat dapat memberikan opini, masukan, dan kritik rancangan kebijakan apabila rancangan kebijakan masih belum tepat

Vinni Dini Pratiwi

dalam menyelesaikan masalah. Tahap Pelaksanaan Kebijakan: Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan. Sikap proaktif masyarakat sangat memengaruhi penyelesaian masalah. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan publik yang baik pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang masih rendah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut faktor internal yang menghambat partisipasi masyarakat: Masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yaitu peraturan tanpa partisipasi warga. Warga hanya menerima dan melaksanakan saja. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Masyarakat tidak tahu prosedur partisipasi. Rendahnya sanksi hukum di kalangan masyarakat. Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik. Selain itu, faktor eksternal juga banyak menghambat terwujudnya partisipasi masyarakat. Berikut faktor eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik: Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Masih adanya anggapan sentralistik atau pemusatan kekuasaan yang tidak sesuai dengan otonomi daerah. Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat akan memperlambat pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang dibuat terkadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Hukum belum ditegakkan secara adil. Tidak memihak kepentingan rakyat.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang berpengaruh. Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintahan yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan penerapan tindakan untuk mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam dan manusia demi kepentingan publik.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat Abdul (2005). Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan

Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik Sebagai Wujud Partisipasi Politik
bupati/walikota. Kebijakan publik memiliki manfaat untuk menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat secara lebih rasional dan legal.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi [politik](#) secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah [mobilisasi politik](#). Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sehingga dengan partisipasi politik tersebut, masyarakat berharap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut.

Golongan partisipasi politik menurut Milbrath and Goel:

- a. Apatis, merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- b. Spektator, merupakan orang yang sedikit-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, merupakan mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam proses politik.
- d. Pengkritik, dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Individu tersebut memberikan opini pemerintah dengan tujuan agar pemerintah suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik dengan cara mengkritik.

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50–60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak

Vinni Dini Pratiwi

merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:

- a. Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
- b. Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya.
- c. Rezim partisipatif - warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.
- d. Rezim *demokratis* - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan prosentase orang yang memilih dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Ternyata juga bahwa pendapatan, pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang berpendapatan tinggi, yang berpendidikan baik, yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah. Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi pula pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinue dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa presentase partisipasi dalam pemilihan umum sering kali berbeda dengan prosentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak

Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik Sebagai Wujud Partisipasi Politik menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti berbagai kegiatan politik.

Penutup

Keterlibatan masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pengelola dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi politik secara aktif bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan politik serta sosialisai politik kepada masyarakat. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya dalam berbentuk pemikiran dan ide-ide, tetapi lebih di tekankan kepada bentuk konkrit untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini camat sebagai pembuat kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat camat dapat dirasakan menyentuh sampai kepada lapisan terbawah dari masyarakat. Selain partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan camat, maka sebaliknya pula, dimana kebijakan camat dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, oleh karenanya kedua hal ini harus dapat berjalan sering agar dapat tercipta suatu keseimbangan

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2005. *Analisis Investasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Akhrani, L. A., Imansari, F., Psikologi, J., & Brawijaya, U. (2018). *Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara memengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu pemilihan penguasa dan secara langsung politik yang dita*. MEDLAPSI, 4(1), 1–6.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. “*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Milbrath, L. & Goel, M. (1977) *Political Participation (2nd ed)*. Chicago: Rand McNally.

Vinni Dini Pratiwi

Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, N. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63–72.

Tristiani, D. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemil Ihan Walikota Semarang Di Kota Semarang*. *Jurnal Politik Dan Kewarganegaraan*, 396 (2), 94–104.